

MENYOROT FUNDAMENTALISME-RADIKALISME ISLAM (Tinjauan Historis atas Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia)

Jaelani

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
E-mail: Lanijaman003@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses fundamentalism and radicalism, especially in the Hizbut-Tahrir movement in Indonesia from a historical perspective. By taking texts from contemporary books and journals, this study describes the formation of fundamentalism and radicalism, particularly the Indonesian Hizbut Tahrir movement, why it emerged, and how it developed in Indonesia. This study found that the presence of Hizb ut-Tahrir in Indonesia which later took the name Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI) was part of the dissemination of Hizb ut-Tahrir's ideology, teachings, movement strategies, and regeneration system throughout the world. Finally, this study also suggests how well the Indonesian people can face the threat of fundamentalism and radicalism.

Keywords: Fundamentalism, Hizbut Tahrir, Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang fundamentalisme dan radikalisme khususnya pada gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia dalam perspektif historis. Dengan mengambil teks-teks dari buku-buku dan jurnal kontemporer, kajian ini mendeskripsikan apa yang menjadi formasi dari fundamentalisme dan radikalisme, khususnya gerakan Hizbut Tahrir Indonesia, mengapa ia muncul, dan bagaimana perkembangannya di Indonesia. Kajian ini menemukan bahwa kehadiran Hizbut Tahrir di Indonesia yang kemudian mengambil nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah bagian dari penyebarluasan ideologi, ajaran, strategi gerakan, dan sistem kaderisasi Hizbut Tahrir keseluruh penjuru dunia. Akhirnya, kajian ini pun menyarankan bagaimana baiknya bangsa Indonesia menghadapi ancaman fundamentalisme dan radikalisme tersebut.

Kata Kunci: Fundamentalisme, Hizbut Tahrir, Indonesia

PENDAHULUAN

Stigma buruk yang dilekatkan terhadap agama (baca: Islam), agaknya sulit dilepaskan manakala menyaksikan orang seringkali menggunakan dalih agama sebagai dasar ideologis dan justifikasi terhadap tindak kekerasan pada golongan atau kelompok lain. Diakui atau tidak bahwa agama mengekspresikan atau mengandung kekerasan, kesimpulan tak terbantah adalah agama memiliki potensi tersebut yang telah disadari melalui penelusuran sejarah, di mana moralitas memiliki akar utamanya pada pengalaman keagamaan (Permata, ed., 2006). Seperti kita ketahui

bersama, tindak kekerasan atas nama agama sering dilakukan oleh orang atau kelompok yang identik dengan istilah fundamentalisme-radikalisme agama.

Terkait fundamentalisme agama, Roger Garaudy sebagaimana dikutip Zuly Qodir (2004), memberikan penjelasan bahwa fundamentalisme bisa terjadi pada berbagai aspek selain agama seperti sosial, budaya maupun politik. Fundamentalisme dikatakan sebagai fenomena yang bertumpu pada keyakinan terhadap pandangan baik aspek agama, politik, sosial dan budaya yang dipeluk penganutnya dan mengacu kepada ajaran-ajaran masa lalu. Termasuk dalam hal ini adalah fundamentalisme-radikalisme Islam.

Orang bisa saja mengatakan bahwa persoalan fundamentalisme - radikalisme Islam terletak pada pemeluknya itu sendiri. Meski demikian perlu untuk dicatat, bahwasanya baik pada level teori atau praktik, fenomena fundamentalisme-radikalisme Islam bukanlah tanpa alasan dan tanpa sasaran. Acap kali kenyataan tersebut mengarah pada kelompok-kelompok pemeluknya. Oleh karena itu, memahami konteks global di mana fundamentalisme-radikalisme keagamaan tersebut berkembang menjadi imperatif. Dengan begitu, kemunculan fundamentalisme-radikalisme dalam Islam yang dipahami orang bukan hanya bersifat *religius-centered* hanya mengarahkan ke hal-hal normatif atau doktriner, tetapi lebih luas dari itu (Sirry, 2003).

Mohammed Arkoun dalam M. Zaki Mubarak (2008) memandang fundamentalisme Islam bagaikan dua buah tarikan berlawanan yakni satu sisi merupakan permasalahan ideologisasi dan di sisi lainnya permasalahan politis. Sedangkan Islam yang selalu akan di posisi tengah. Manusia tak selamanya terlalu paham dengan urusan tersebut. Fundamentalisme dimaknai secara sembarang sebagai bagian esensi dari kaidah Islam, sementara fenomena politik beserta ideologi terabaikan. Pemahaman Islam sendiri merupakan aktivitas kesadaran mencakup konteks sejarah, sosial masyarakat dan politik. Begitu pun ketika menginterpretasikan perkembangan dari fundamentalisme Islam. Tarik menarik baik aspek politik maupun sosial melahirkan konstruksi ideologis dalam pemikiran manusia. Islam tak menawarkan adanya paham kekerasan atau sering disebut radikalisme. Permasalahan radikalisme hanyalah permainan kekuasaan yang mengeras dalam fanatisme kronis. Dalam sejarahnya, paham radikal muncul dari persimpangan sosial dan politik. Radikalisme Islam di Indonesia adalah realitas dari tarikan yang berseberangan itu.

Permasalahan fundamentalisme-radikalisme Islam dalam konstelasi politik Indonesia telah membesar dikarenakan pendukungnya semakin meningkat. Namun terkadang gerakan-gerakan ini berbeda tujuan dan tidak memiliki pola seragam. Ada yang hanya memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa diikuti dengan keharusan menegakkan "negara Islam". Namun ada juga yang memperjuangkan pembentukan negara Islam Indonesia, atau yang memperjuangkan tegaknya *Khilafah*

Islamiyah. Pola organisasinya juga beragam, dari yang hanya gerakan moral ideologi misalnya Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sampai kepada gaya militer seperti Laskar Jihad dan FPI (Turmudi, ed., 2005).

Gerakan fundamentalisme-radikalisme yang hadir di Indonesia sebagian besar ialah berangkat dari adanya ketidakpuasan dan keinginan untuk menerapkan syariat Islam di Negara Indonesia. Anggapan mereka bahwa ketidakadilan, korupsi yang merajalela, krisis berkepanjangan, ketidakharmonisan si kaya dan si miskin merupakan dampak dari tidak dilaksanakannya syariat Islam. Istilah fundamentalisme-radikalisme Islam semakin menguat tidak hanya pada dimensi tekstualitas agama. Persentuhan dengan globalisasi, menuntut adanya ekspansi gerakan yakni dimulai dari ranah sosio ekonomi, selanjutnya ke ranah pendidikan sampai pada ranah politik. Di Indonesia kemunculan fundamentalisme-radikalisme Islam diperkirakan salah satunya disebabkan oleh kedatangan orang-orang Arab muda dari wilayah Hadramaut Yaman ke wilayah Indonesia. Mereka datang disertai dengan ideologi baru dan sudah mampu mengubah tatanan umat Islam di Tanah Air. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan untuk menyorot gerakan fundamentalisme-radikalisme Islam dalam sejarah kehidupan umat muslim dan hubungannya dengan kemunculan Hizbut Tahrir Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku, dokumen, catatan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sesuai dengan metode sejarah yang diawali dengan mencari dan menemukan bahan bacaan yang diperlukan, menyeleksi dan mengklasifikasikan bahan bacaan, membaca dan membuat catatan penelitian, dan kemudian mulai menulis laporan. Karena itu, penelitian ini sesungguhnya merupakan kajian historis mengenai gerakan Hizbut Tahrir Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Kemunculan Gerakan Fundamentalisme-Radikalisme Islam

Yusril Ihza Mahendra dalam Ahdar (2017), menyebutkan bahwa fundamentalisme adalah istilah yang tidak ditemukan pada perbendaharaan kata dalam bahasa masyarakat muslim. Istilah ini lahir dari para akademisi Barat dan dalam konteks sejarah agama Kristen. Fundamentalisme diartikan sebagai aliran yang berpegang teguh pada "fundamen" agama Kristen melalui penafsiran kitab suci mereka secara rigid dan literalis. John. L. Esposito seperti dikutip Ahdar (2017), menyebutkan bahwa fundamentalisme muncul sebagai reaksi terhadap modernisme yang lahir di Amerika Serikat. Ketika itu sekelompok teolog Amerika antara tahun 1909 dan 1915, mempublikasikan sebuah buku

dengan judul *“The Fundamentals: A Testimony to The Truth”*. Dalam buku kecil ini, didefenisikan apa yang menjadi keyakinan mereka tentang doktrin dasar Kristen, sehingga pendukung sikap ini disebut kaum “fundamentalisme”.

Selanjutnya pada tahun 1970-an, ketika publik semakin disadarkan oleh gerakan kebangkitan agama di tengah masyarakat, istilah ini mulai dilekatkan pada berbagai gerakan kebangkitan agama dalam bermacam-macam konteks. Orang mulai membicarakan fundamentalisme Hindu, Yahudi dan Islam. Hingga tahun 1990-an frase “Fundamentalisme Muslim” atau Fundamentalisme Islam sudah banyak digunakan dalam literatur ilmiah maupun jurnalistik (Ahdar, 2017). Istilah “modernisme” dan “fundamentalisme” kemudian digunakan oleh para orientalis dan pakar ilmu sosial Barat untuk membedakan dua kecenderungan pemikiran yang hampir sama dengan apa yang dijumpai dalam agama Kristen itu, ke dalam masyarakat yang memeluk agama lain, termasuk dalam masyarakat muslim.

Namun demikian, Azyumardi Azra (1996) menilai keliru pendapat Roger Graudy yang menyatakan bahwa kemunculan fundamentalisme Islam sebagai bentuk reaksi terhadap adanya fundamentalisme Barat. Menjadikan Barat sebagai penyebab tunggal lahirnya berbagai gerakan fundamentalisme Islam, tidak hanya mencerminkan sikap apologetik, tetapi juga penyederhanaan indikasi perkembangan sosio-historis kaum Muslimin. Bisa dikatakan prinsip dan karakteristik yang menjadikan suatu gerakan tertentu bisa dimaknai “fundamentalis” juga terjadi di kalangan Muslim sepanjang sejarah. Oleh karenanya, fundamentalisme Islam sebenarnya tidak sepenuhnya baru, karena sebelum lahirnya fundamentalisme kontemporer sudah ada gerakan yang bisa disebut sebagai *prototype* berbagai gerakan fundamentalisme yang ada pada masa-masa belakangan.

Fundamentalisme Islam dalam kacamata sejarah dapat diartikan sebagai suatu usaha sungguh-sungguh untuk melindungi, membela dan mengekalkan kemurnian Islam terhadap berbagai pengaruh asing dengan kembali kepada pondasi-pondasi skiptural (sederhananya diartikan sebagai pemahaman berdasarkan bunyi teks secara apa adanya). Sumber-sumber skiptural sebagai fundamen-fundamen Islam ialah al-Qur'an dan Hadis. Fundamentalisme skiptural, sebetulnya menjadi instrumen tangguh dalam menyebarkan Islam pada tingkatan masyarakat bawah dari kalangan masyarakat kota sepanjang sejarah penyebaran Islam, dan juga sudah menjadi bagian integral dari proses islamisasi. Perkembangan masyarakat dalam sejarahnya dipandang sebagai *“as it should be”* bukan *“as it is”*. Dalam hal ini, masyarakat seharusnya menyelaraskan perkembangannya agar sejalan dengan teks kitab, bukan malah teks atau penafsirannya menyesuaikan perkembangan masyarakat tersebut. Karenanya kelompok fundamentalis dapat dikatakan ahistoris dan asosiologis dan tidak peduli mengarah kembali pada bentuk masyarakat *“ideal”*, bagi mereka Islam seperti halnya kaum salaf yang dianggap mengejawantahkan kitab suci secara lebih sempurna.

Secara sosiologis Martin F. Marty seperti dikutip Azyumardi Azra (1996), memberikan kodifikasi-kodifikasi yang relevan untuk mengenal gejala “fundamentalisme Islam” menjadi empat prinsip. Pertama, prinsip *oppositionalism* (paham perlawanan). Paham fundamental dalam agama apapun mengambil corak perlawanan yang kadang bersifat ekstrem terhadap ancaman yang dilihat membahayakan eksistensi agama, apakah itu dalam tata nilai Barat atau secara umum. Acuan untuk menilai taraf ancaman tersebut tentu saja ialah kitab suci yang dalam urusan fundamentalisme Islam ialah al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua, prinsip penolakan terhadap hermeneutika yaitu mereka yang menolak sikap kritis (liberal) baik teks al-Quran maupun interpretasinya. Teks al-Quran harus dimaknai secara literal, karena nalar dianggap belum mampu menyuguhkan interpretasi teks secara tepat. Kalaupun terdapat bagian teks kitab suci terlihat bertentangan antara satu dan lainnya, nalar tak dibenarkan untuk melakukan “kompromi” dalam menginterpretasikan ayat-ayat itu.

Ketiga, prinsip penolakan pluralisme dan relativisme. Kaum fundamentalisme memandang pluralisme sebagai hasil pemahaman yang kurang tepat terhadap teks al-Quran. Pemahaman-pemahaman dan segala bentuk sikap keagamaan seseorang yang tidak sejalan dengan pandangan golongan fundamentalis adalah bentuk relativisme keagamaan terutama yang muncul bukan hanya berdasarkan intervensi nalar, tapi juga disebabkan perkembangan kemasyarakatan yang sudah lepas dari kontrol agama. Kemunculan pemikiran baru dianggap gejala bahwa telah terjadi peralihan dalam aspek kehidupan sosial masyarakat (Abdullah, 1987). Keempat, prinsip penolakan adanya perkembangan historis dan aspek sosiologis. Kaum fundamentalis melihat kedua aspek perkembangan tersebut sudah membawa manusia kian menjauhi doktrin literal terhadap kitab suci mereka.

Untuk memahami gerakan modern dalam Islam, tidak bisa mengabaikan dinamika politik dunia Islam pada abad XX. Dalam hal ini ada dua organisasi yang dominan, dimana aktivisme Islam kontemporer berhutang budi pada ideologi dan contoh organisatoris yang ditemukan dalam tubuh Ikhwan al-Muslimin yang didirikan di Mesir pada tahun 1928 dan Jama'ah al-Islamiyah yang didirikan di India tahun 1941. Pendiri dan ideolognya adalah Hasan al-Banna dan Sayyid Qutub, keduanya dari Ikhwan al-Muslimin, dan Maulana Abu al-'Ala al-Maududi dari Jama'ah al-Islamiyah, telah memperlihatkan pengaruh mereka yang tak terhingga besarnya dalam perkembangan organisasi modern Islam di segenap penjuru dunia Islam. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah para arsitek revivalisme Islam, dimana gagasan dan metodenya dipelajari dan diterapkan mulai dari Sudan hingga Indonesia (John. L. Esposito dalam Ahdar, 2017).

B. Hizbut Tahrir Indonesia

Sebelum membahas Hizbut Tahrir Indonesia selanjutnya disebut HTI, terlebih dahulu menelisik sedikit tentang lahirnya hizbut tahrir dalam

konteks dunia Islam. Ini untuk melihat ketersambungan historis dan genealogis bahwa lahirnya HTI, tidak bisa dilepaskan dari gerakan Hizbut Tahrir (HT) di Timur Tengah.

Hizbut Tahrir (*Hizb Al-Tahrir*) merupakan suatu gerakan kontemporer sebagai bagian transmisi ide islamis asal Timur Tengah, didirikan Taqiyuddin An-Nabhany (1909-1979), seorang kelahiran Ijzim, Haifa, Baitul Maqdis Palestina tahun 1952. An-Nabhani adalah alumnus Universitas Al-Azhar dan *Dar Al-'Ulum*, Kairo Mesir dan seorang guru agama serta mantan qadi di daerah kelahirannya. Tujuan didirikan Hizbut Tahrir ialah untuk melanjutkan kehidupan Islam dan meneruskan dakwah ke berbagai pelosok dunia. Pandangan hidup menjadi fokus perhatian yaitu halal-haram sesuai naungan Daulah Islamiyah, yakni Daulah Khilafah. Selain juga bertujuan menyampaikan hidayah kepada umat, memimpin mereka untuk melawan berbagai ide dan perundang-undangan yang dianggap kufur termasuk kekufuran itu sendiri, sehingga Islam diharapkan mampu menyelimuti dunia (Hizbut Tahrir, 2013).

Hizbut Tahrir, secara etimologis diartikan sebagai partai pembebasan. Organisasi tersebut, seperti diakui oleh pendirinya beserta para aktivisnya, bukan merupakan organisasi atau perkumpulan sosial keagamaan melainkan sebagai partai politik. Perbedaan mencolok dari partai politik lain secara umum, bahwa Hizbut Tahrir merupakan partai politik Islam berasaskan transnasionalisme. Sepeninggalan Taqiyuddin An-Nabhany, kepemimpinan organisasi Hizbut Tahrir diteruskan Abdul Qadim Zallum. Berbagai pandangan dari kedua tokoh itu sangat mewarnai gerakan Hizbut Tahrir. Selanjutnya sepeninggal kedua tokoh penting tersebut, sejak 2003 Hizbut Tahrir diketuai oleh A. Abu Rostah. Secara internasional, belaiulah yang dianggap orang nomor satu dalam struktur kepemimpinan Hizbut Tahrir saat ini (Turmudi, ed., 2005).

Sejak diselenggarakan Konferensi Internasional di Istora Senayan Jakarta, dihadiri banyak tokoh Hizbut Tahrir secara Internasional, Nasional dan beberapa tokoh Islam dari organisasi lainnya, maka Hizbut Tahrir resmi melaksanakan aktivitasnya secara terbuka di Indonesia. Dalam konteks keindonesiaan kemudian dikenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Jika ditelusuri kemunculan gerakan Islam yang termasuk dalam garis keras bahkan fundamentalis secara umum di Indonesia sudah dimulai dari perubahan kebijakan negara dasawarsa 1980 an, sejak pemunggiran Islam ke dalam akomodasi Islam (Kurdi, 2013). Selanjutnya sebagai gerakan awal, menurut Turmudi, dkk. (2005) HTI mulai mensosialisasikan gerakannya dikampus IPB dan tampaknya mendapat sambutan yang baik. Diketahui bahwa salah seorang pimpinan pusat HTI bernama Muhammad al-Khottot merupakan alumni IPB. Kelompok ini menganut paham integrasi antara agama dan Negara. Oleh karena itu, HTI mengusung ide perlunya mendirikan kembali *khilafah islamiyyah*. Mereka berpendapat bahwa dengan sistem kekhalifahan maka dapat dihindari yang namanya hegemoni dan dominasi satu negara terhadap negara lain baik dalam bentuk

kolonialisme fisik maupun non-fisik. Aspirasi ini begitu kuat karena faktor kontekstual di mana sering satu negara begitu otoriter mengatur negara lain dengan segala justifikasinya. Kemudian kehidupan umat Islam saat itu yang sangat tidak Islami sebagai akibat sekulerisasi (Ahdar, 2017).

HTI memiliki misi untuk menjaga kontinuitas ajaran Islam, yaitu: 1) Melanjutkan kehidupan islami, 2) Membangun jaringan yang luas, dan 3) Pendidikan luas kepada masyarakat supaya dapat berfikir dan bertindak islami. Kelompok ini tidak menonjolkan klaim sebagai yang paling benar, namun mereka berprinsip untuk saling nasihat-menasihati (taushiyah), mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, kepada kelompok yang berbeda. Perbedaan pendapat dalam pandangan mereka, tidak perlu membawa perpecahan. HTI banyak beraksi dalam perang pemikiran sebagaimana sikap yang mereka usung yaitu tausiah. Seperti dengan Jaringan Islam Liberal (JIL), mereka tidak mengafirkan kelompok ini, namun menganggap mereka sudah tercemar oleh gaya pemikiran sekuler dan liberal. Jadi dalam pandangan HTI, JIL tidak murtad atau keluar dari Islam, tetapi hanya pemikirannya yang menyimpang (Ahdar, 2017).

HTI dibangun atas dasar kemandirian, dimana sumber dananya diperoleh dari simpatisan. Mereka tidak menerima atau menolak bahkan mengharamkan segala bantuan pemerintah. Demi menjaga independensi, berbagai sumbangan yang ditujukan kepada HTI harus melewati penelitian yang ketat dan seksama. Sejak berdirinya HTI memang didesain menjadi organisasi politik, namun orientasi organisasi ini berbeda dengan organisasi politik yang kita kenal selama ini. HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai peserta pemilu. Hal itu menurut aktivisnya seperti dikutip Endang Turmudi, dkk. (2005) bahwa sekarang ini banyak partai Islam justru membingungkan umat Islam. Oleh karena itu, mereka tidak mengikuti jejak partai-partai Islam lainnya. Untuk lebih mengenal sebagaimana gerakan Hizbut Tahrir termasuk HTI, maka pembahasan berikut akan mendeskripsikan tentang ideologi gerakan, strategi, sistem dakwah dan kaderisasinya.

1. Ideologi dan Strategi Gerakan

Sebuah organisasi tentu memiliki landasan dalam bergerak yang lazim disebut “ideologi gerakan”. Terkait dengan Hizbut Tahrir, dijelaskan bahwa *plat form* organisasi tersebut adalah gerakan politik berideologi Islam. Adapun agenda utama dari partai ini adalah menegakkan kembali Khilafah Islamiyah (Al-Qardawi, 2005) dan meneguhkan hukum Islam dalam realitas kehidupan.

Hizbut Tahrir memiliki cita-cita bersama yaitu membangun konstelasi masyarakat dan sistem perpolitikan berdasarkan aqidah Islam. Dinyatakan bahwa Islam, haruslah dijadikan sebagai tata aturan dalam kemasyarakatan dan landasan konstitusi serta undang-undang. Selain bermaksud membangunkan umat dari kemerosotan, juga membebaskan mereka dari ide-ide, sistem undang-undang dan hukum yang tidak berasal

dari ajaran Islam, serta melepaskan umat dari dominasi pengaruh Barat. Hizbut Tahrir berniat pula membangun kembali Khilafah Islamiyah di berbagai belahan dunia. Organisasi tersebut berkeyakinan melalui Daulah inilah hukum Islam dapat diterapkan (Rahmat, 2005)

Gerakan yang dilaksanakan organisasi ini antara lain: pendidikan sekaligus pembinaan umat dengan *saqafah* (wawasan) Islam, menggencarkan *syira'u al-fikr* (pertarungan pemikiran), dan *kifah al-siyasi* (aktivitas politik) (Rahmat, 2005). Dalam pembinaan umat, Hizbut Tahrir berusaha menyebarluaskan pemikiran Islam yang menurut mereka benar, berkaitan dengan kerangka sosial dan politik. Disamping itu, mereka melakukan pembebasan umat dari aqidah yang rusak, pemahaman yang salah, persepsi-persepsi yang keliru, dan pengaruh serta pandangan barat yang diduga kufur.

Gerakan pergulatan pemikiran, dilakukan dengan mengulas paham-paham yang dianggap sesat, lalu menawarkan kerangka pemikiran yang Islami. Sedangkan gerakan politik dilakukan dengan melawan imperialisme dan membebaskan umat Islam dari pengaruh politik mereka. Memerdekakan umat dari dominasi Barat dan mengkerangkeng akar-akar imperialisme, baik berupa pemikiran, ekonomi, kebudayaan maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam.

Strategi politik yang dijalankan Hizbut Tahrir adalah dengan memposisikan diri sebagai kekuasaan oposisi yang menantang rezim penguasa yang tak menjalankan sistem politik dan syariah Islam. Dari keseluruhan aktivitasnya, yang paling fokus adalah propaganda untuk menangkal sistem politik yang bersumber dari Barat, karena dianggap sekuler dan sumber dari segala permasalahan (Muazaroh, 2019). Mereka menolak konsepsi nasionalisme, demokrasi, trias politika, kedaulatan rakyat, sistem kekuasaan turun menurun, hukum sekuler, dan konsep politik yang tidak berdasarkan syariah Islam (Rahmat, 2005).

Di samping itu, seperti telah disebutkan di awal bahwa Hizbut Tahrir tidak mengaitkan diri dalam praktek-praktek politik resmi. Perjuangan mereka secara ekstra parlementer, sebab dengan melibatkan diri dalam proses politik demokrasi artinya telah mengkhianati kepercayaan dan kewajiban agama. Demikian juga dengan sistem ekonomi mereka memiliki konsep yakni ekonomi berdasarkan syariah Islam, menolak kapitalisme dan sosialisme (Rahmat, 2005).

2. Sistem Dakwah dan Kaderisasi

Konsep Hizbut Tahrir dalam mentransformasikan gagasan Khilafah Islamiyah dan menyiapkan kader masa depannya dilakukan melalui tahapan-tahapan dakwah sebagai berikut (Rahmat, 2005):

a. Tahap Pengkaderan.

Pada fase ini, pembinaan yang dilaksanakan ialah untuk memunculkan orang-orang yang memiliki keyakinan akan *fikrah* Hizbut Tahrir yang disebut *tasqif*, termasuk membentuk rangka sebuah organisasi berideologi Islam. Pada awalnya, fokus dakwah Hizbut Tahrir

dipusatkan pada pembinaan kerangka organisasi, yakni memperbanyak para pendukung dan membina pengikutnya melalui *halaqah* berdasarkan *saqafah al-hizb* yang tertata dan intensif.

Setelah berhasil menciptakan kelompok dan masyarakat sejak merasakan dan mengenal Hizbut Tahrir sebagai kubu Islam, maka masyarakat itu akan dengan mudah menerima ide dan gagasan yang disampaikan Hizbut Tahrir kepada masyarakat. Sehingga pada fase ini dianggap sebagai bagian dari strategi gerakan menuju ke tahap selanjutnya.

b. Tahap Interaksi dengan Masyarakat.

Tahap ini disebut *tafa'ul* yaitu berupa upaya menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan dakwah Islam, dilakukan dengan membentuk kesadaran, opini umum akan gagasan dan hukum Islam sesuai pilihan dan yang sudah ditetapkan oleh Hizbut Tahrir. Pada fase ini, Hizbut Tahrir berubah ketahapan kolektif lebih luas seperti: 1) *saqafah al-murakkazah*, melalui *halaqah* dalam membangun rangka pergerakan; 2) *saqafah al-jama'iyyah*, melalui aktivitas intelektual dan publikasi ilmiah; 3) *sira' al-fikry*, melalui pergolakan pemikiran untuk menentang berbagai ideologi yang lain, dan 4) *kifah al-siyasi*, dengan perjuangan politik terhadap kaum imperialis, penguasa yang zalim, berdasarkan hukum *sara'*.

c. Tahap Merebut Kekuasaan.

Tahap ini disebut *istilam al-hukmi*, strategi organisasi Hizbut Tahrir diarahkan ke penyebaran risalah Islam ke seluruh penjuru negeri. Meski demikian, Hizbut Tahrir membatasi kegiatan dakwahnya pada aspek politik saja dengan tidak menggunakan kekerasan (secara fisik maupun senjata), dalam melawan sistem kekuasaan maupun berbagai pihak yang menjadi penghalang kegiatan dakwahnya. Perebutan kekuasaan menurut konsep Hizbut Tahrir akan muncul dengan perlawanan rakyat secara masif tanpa harus menggunakan senjata. Hizbut Tahrir memandang perjuangan fisik dalam konsep jihad hanya akan dilakukan, jika musuh-musuh menyerang atau mengancam salah satu negara Islam.

PENUTUP

Agama (baca: Islam) ternyata memiliki banyak wajah (*multifaces*), artinya bukan lagi suatu *single face*. Selain ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang konvensional yang mengasumsikan keagamaan sebagai semata permasalahan ketuhanan, ternyata memiliki kaitan yang erat dengan persoalan-persoalan historis-kultural. Persoalan yang timbul kemudian adalah sejauh mana dapat diketahui tentang agama yang terbebas dari 'kepentingan', terbebas dari campur tangan penganutnya; khususnya yang tidak sejalan dengan jiwa agama itu sendiri. Sebenarnya tak seorangpun yang tidak membutuhkan agama serta tidak memerlukan aturan-aturan sebagai penuntun dan pengatur cita-cita dan kepentingannya. Bisa saja

seseorang tidak sadar akan keyakinan-keyakinan keagamaan sebagai sesuatu yang berbeda dengan keyakinan totalnya. Letak masalahnya bukan pada seseorang itu menganut atau tidak menganut suatu agama, melainkan bagaimanakah ia mempraktikkan ajaran agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. (1987). *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*. Jakarta: YOI.
- Ahdar, A. (2017). Tinjauan Kritis dan Menyeluruh terhadap Fundamentalisme dan Radikalisme Islam Masa Kini. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 10(1), 19-36.
- Azra, Azyumardi. (1996). *Pergolakan Politik Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Hizbut Tahrir. (2013). *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Bogor: Thariqul Izzah.
- Kurdi, S. (2013). Transnational Islamic Movement (Studi Gerakan Islam Hizbut Tahrir Indonesia). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 1(2), 227-244.
- Muazaroh, S. (2019). Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Maqashid: Otoritas atau Otoritarianisme. *Justicia Islamica*, 16(1), 103-120.
- Mubarak, M. Zaki. (2008). *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Nafis, Muhammad Wahyuni (ed). (1996). *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Permata, Ahmad Norma (ed). (2006). *Agama dan Terorisme*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rahmat, M. Imdadun. (2005). *Arus Baru Islam Radikal; Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sirry, Mun'im A. (2003). *Membendung Militansi Agama; Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Turmudi, Endang (ed). (2005). *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Qodir, Zuly. (2004). *Syariah Demokratik; Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.